



**PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA BERUPA PENYITAAN
HARTA TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN**

TESIS

IWAN YUHANDRI

NIM: 1910622016

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2021**



**PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA BERUPA PENYITAAN
HARTA TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**IWAN YUHANDRI
NIM: 1910622016**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Iwan Yuhandri

NRP : 1910622016

Tanggal : 17 Juli 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Iwan Yuhandri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Yuhandri
NRP : 1910622016
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA BERUPA PENYITAAN HARTA TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Iwan Yuhandri

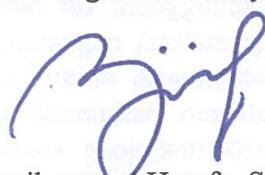
PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Iwan Yuhandri
NRP : 1910622016
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tugas Akhir Tesis : Penerapan Pidana Pengganti Denda Berupa Penyitaan Harta Terpidana Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



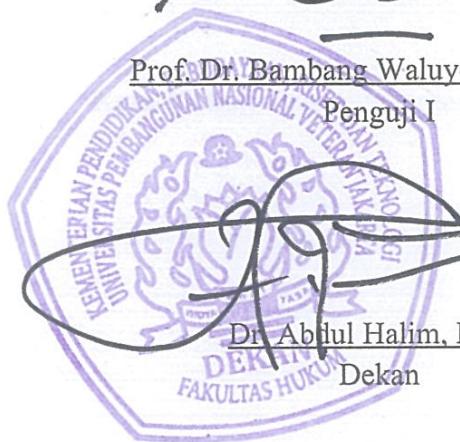
Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Ketua Pengaji



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Pengaji II / Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 17 Juli 2021

PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA BERUPA PENYITAAN HARTA TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Iwan Yuhandri

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pidana pengganti denda berupa penyitaan harta terpidana dan pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan serta untuk mengetahui bagaimana seharusnya penerapan pidana pengganti denda berupa penyitaan harta terpidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang belum diatur pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Hal ini menimbulkan pendapat yang berbeda di kalangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan bahan hukum primer, dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hakim dalam menjatuhkan pidana pengganti denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan terdapat dua pendapat yang berbeda di dalam putusan pengadilan, yaitu: *Pertama*, putusan yang langsung mensubsidairkan penyitaan harta benda terpidana jika terpidana tidak membayar denda; *Kedua*, langsung mensubsidairkan kurungan pengganti denda jika terpidana tidak membayar denda, tanpa menyita harta benda terpidana. Pidana kurungan pengganti denda mengacu pada Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Denda, Penyitaan, Terpidana, Pidana, Perpajakan

APPLICATION OF CRIMINAL SUBSTITUTION FINES IN THE FORM OF CONFISCATION OF THE CONVICTED'S ASSETS IN TAXATION CRIMES

Iwan Yuhandri

Abstract

This research was conducted to find out the application of criminal penalties in the form of confiscation of the convict's property and imprisonment in lieu of fines in criminal acts in the taxation sector and to find out how the application of criminal penalties in lieu of fines in the form of confiscation of the convict's assets in criminal acts in the field of taxation that has not been regulated in law General Provisions on Tax Procedures (UU KUP). This gives rise to different opinions among judges in making their decisions, giving rise to legal uncertainty. The method used in this paper uses normative legal research, with a statute approach and a case approach, using primary legal materials, with data collection by library research, then analyzed using qualitative methods. Judges in imposing a fine in lieu of a fine in a tax crime, there are two different opinions in the court's decision, namely: *First*, a decision that directly subsidizes the confiscation of the convict's property if the convict does not pay the fine; *Second*, immediately subsidize confinement in lieu of fines if the convict does not pay the fine, without confiscating the convict's property. Imprisonment in lieu of a fine refers to Article 30 and Article 31 of the Criminal Code (KUHP).

Keywords: Fine, Confiscation, Convicted's, Crime, Taxation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak Maret 2021 ini adalah “Penerapan Pidana Pengganti Denda Berupa Penyitaan Harta Terpidana Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan”. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan strata dua pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, perlu adanya pengaturan terhadap penyitaan harta terpidana sebagai Pajak Kurang Bayar (PKB) yang nantinya akan ditagihkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak, disamping itu perlu juga adanya pengaturan pidana kurungan di dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai *Lex Specialis*, yang selama ini penerapan pidana kurungan pengganti denda menggunakan Pasal 30 KUHP.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dari banyak pihak yang membantu, baik berupa bantuan moral maupun material. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, sekaligus Ketua Penguji;
4. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Penguji Kedua yang telah memberikan saran yang bermanfaat dalam penulisan tesis ini;

5. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., selaku Pengaji Pertama yang telah memberikan saran dan ilmunya kepada penulis;
6. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan Tahun 2019, khususnya Konsentrasi Hukum Pidana;
8. Kedua orang tuaku, Ayahanda Almarhum Mayor Inf (Purn) Kadmi dan Ibunda Erwaida serta kedua mertua H. Sufirman Arif, B.B.A., S.H. dan Hj. Rahmi Hasan, B.A. yang telah mendoakan hingga selesainya studi ini;
9. Saudara-saudaraku, Wahyu Putra Yudha, S.Pi dan Supra Admiraldi, S.E. atas dukungan dan motivasinya;
10. Terspesial istriku tercinta Ramadaniati, S.H. "*I'm the one who wants to love you more*", terima kasih atas doa, motivasi, dukungan dan cintanya, "*Let me be the one to love you more*".
11. Anak-anakku, dambaanku selamanya Alesha Avicena Yuhandri dan Alfalah Wicaksana Yuhandri, tetaplah menjadi penyemangat dalam hidupku;
12. Semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana di bidang perpajakan.

Jakarta, Juli 2021

Penulis,

Iwan Yuhandri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	13
I.3 Tujuan Penelitian	14
I.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian	14
I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	14
I.5.1 Kerangka Teoritis	14
a. Teori Penegakan Hukum	15
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana	17
c. Teori Pemidanaan	19
I.5.2 Kerangka Konseptual	21
I.6 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
II.1 Sejarah Perpajakan di Indonesia	25
II.1.1 Sebelum Kemerdekaan	26
II.1.2 Setelah Kemerdekaan	28
II.1.3 Masa Reformasi Pajak Nasional	29
II.2 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	34
II.3 Pengertian Pajak	38
II.4 Jenis-jenis Pajak	40
II.5 Fungsi Pajak	41
II.6 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	42
II.7 Asas <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	44
II.8 Faktur Pajak	45
II.9 Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	46
II.10 Hukum Perpajakan	48
II.11 Pengaturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	49
II.12 Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya	50
II.13 Pidana Pengganti Denda	51
II.14 Penyitaan Harta Terpidana	51
II.15 <i>Restorative Justice</i> Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	53

BAB III METODE PENELITIAN	55
III.1 Jenis Penelitian	55
III.2 Pendekatan Masalah	56
III.3 Sumber Bahan Hukum	57
III.4 Teknik Pengumpulan Data	61
III.5 Teknik Analisis Data	61
BAB IV PEMBAHASAN	62
IV.1 Penerapan Pidana Pengganti Denda Berupa Penyitaan Harta Terpidana dan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	62
IV.1.1 Penerapan Pidana Pengganti Denda Berupa Penyitaan Harta Terpidana Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	63
IV.1.2 Penerapan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan	81
IV.2 Penerapan Pidana Pengganti Denda Berupa Penyitaan Harta Terpidana Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang Belum Diatur Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	89
BAB V PENUTUP	104
V.1 Kesimpulan	104
V.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
RIWAYAT HIDUP	